



Studi Kasus Tantangan Tata Kelola Pendidikan Islam di Daerah 3T: Analisis di Desa Parlampungan, Mandailing Natal

Riski Humairoh Nasution¹, Rini Safitri², Nurul Paizah³, Hasmiah⁴
STAIN Mandailing Natal^{1,2,3,4}

riskihumairohnasution@gmail.com¹, rinisafitrisitompul1211@gmail.com²,
nurulpaizah8@gmail.com³, hasmiahpoel@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan tata kelola pendidikan Islam di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di desa Parlampungan, Mandailing Natal, dengan menyoroti aspek infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan, serta benturan antara nilai-nilai lokal dan pendekatan pendidikan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur dan studi kasus pada beberapa lembaga pendidikan Islam di wilayah 3T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di daerah 3T menghadapi keterbatasan yang sistemik, mulai dari sarana prasarana yang minim, kekurangan guru berkualifikasi, lemahnya kapasitas manajerial, hingga kurangnya dukungan kebijakan yang kontekstual. Selain itu, ditemukan adanya ketegangan antara nilai-nilai lokal dengan kurikulum nasional yang bersifat seragam, yang berpotensi mereduksi identitas budaya peserta didik. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi tata kelola yang adaptif dan berbasis komunitas, termasuk pengembangan kurikulum yang kontekstual dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan Islam yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga relevan secara sosial dan kultural.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kearifan Lokal, Kurikulum Nasional.

Abstract

This study aims to analyze the challenges of Islamic education governance in Parlampungan village, Mandailing Natal 3T regions (Frontier, Outermost, and Disadvantaged), focusing on infrastructure, human resources, policy implementation, and the conflict between local values and national education approaches. A descriptive qualitative method was employed, utilizing literature reviews and case studies of Islamic educational institutions in 3T areas. The findings reveal systemic limitations, including inadequate facilities, shortage of qualified teachers, weak managerial capacity, and lack of contextualized policy support. Moreover, the tension between local cultural values and the standardized national curriculum poses a significant challenge, potentially undermining students' cultural identities. The study suggests the need for adaptive, community-based governance reforms, incorporating contextual curriculum development and capacity building for educators. These findings highlight the

importance of an Islamic education governance model that is not only administratively accountable but also socially and culturally relevant to the unique realities of 3T regions.

Keywords: *Islamic Education, Local Wisdom, National Curriculum.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Dalam konteks nasional, pendidikan Islam memegang peranan penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritualitas bangsa Indonesia. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pemerataan akses dan kualitas pendidikan Islam di berbagai daerah di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika berbicara tentang daerah-daerah yang tergolong dalam kategori 3T-Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Ketiga kategori ini mengindikasikan wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, secara ekonomi kurang berkembang, dan secara sosial-politik sering kali terpinggirkan dari arus utama pembangunan nasional, termasuk dalam sektor pendidikan.

Dalam situasi seperti ini, tata kelola pendidikan Islam di daerah 3T menghadapi tantangan yang tidak ringan. Permasalahan seperti minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, distribusi dana yang tidak merata, hingga lemahnya dukungan kebijakan lokal menjadi hambatan nyata. Di samping itu, keberadaan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, maupun sekolah berbasis agama lainnya sering kali bergantung pada inisiatif komunitas lokal dan dukungan masyarakat sekitar. Ini berarti, kualitas dan keberlanjutan lembaga pendidikan tersebut sangat tergantung pada konteks sosial dan ekonomi masyarakatnya, yang di daerah 3T cenderung berada dalam kondisi terbatas.

Pokok bahasan naskah ini berfokus pada bagaimana tantangan-tantangan tersebut memengaruhi tata kelola pendidikan Islam di daerah 3T khususnya di desa Parlampungan, Mandailing Natal. Tata kelola dalam konteks ini mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pendidikan Islam, serta keterlibatan aktor-aktor kunci seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat. Naskah ini akan mengurai dinamika yang terjadi antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di tingkat lokal, serta mengkaji bagaimana praktik-praktik lokal dapat mencerminkan, merespons, atau bahkan menolak kebijakan-kebijakan nasional terkait pendidikan Islam.

Pentingnya tema ini dibahas tidak hanya karena menyangkut isu keadilan sosial dan pemerataan hak atas pendidikan, tetapi juga karena pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam memperkuat kohesi sosial, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta mengembangkan

kearifan lokal. Dalam konteks daerah 3T, pendidikan Islam bisa menjadi jembatan penting antara tradisi lokal dan pembangunan nasional. Namun untuk itu, tata kelola yang baik dan adaptif terhadap kondisi lokal menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan-tantangan tersebut menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

Lebih jauh, penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai persoalan dan dinamika yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan Islam di daerah 3T. Dengan menyoroti kasus-kasus nyata dari beberapa wilayah representatif, naskah ini ingin menunjukkan bahwa persoalan tata kelola bukan sekadar persoalan administratif atau teknis, tetapi berkaitan erat dengan struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat. Diharapkan bahwa hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat landasan kebijakan pendidikan Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman wilayah di Indonesia.

Melalui pendekatan yang reflektif dan kontekstual, naskah ini juga berupaya mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam merancang solusi yang bersifat kolaboratif dan partisipatif. Dengan demikian, naskah ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan. Tujuan akhirnya adalah membangun sistem tata kelola pendidikan Islam yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil dan berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan perhatian negara: daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam realitas tata kelola pendidikan Islam di daerah-daerah yang tergolong 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam, terutama menyangkut interaksi antaraktor, kendala struktural, serta dinamika lokal dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Studi ini menemukan bahwa tantangan tata kelola pendidikan Islam di daerah 3T bersifat kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan sumber daya fisik dan manusia, tetapi juga dari dinamika sosial, budaya, dan

kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi geografis dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan Islam di wilayah 3T masih bergantung pada inisiatif lokal dan partisipasi komunitas, terutama dalam aspek pendanaan, tenaga pengajar, dan pengembangan kurikulum yang kontekstual.

A. Lemahnya Infrastruktur Pendidikan

Secara empiris, ditemukan bahwa lemahnya infrastruktur pendidikan, seperti akses jalan, jaringan listrik, dan internet, menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar secara optimal. Di beberapa wilayah, madrasah dan pesantren tidak memiliki gedung permanen, serta minimnya fasilitas dasar seperti perpustakaan dan laboratorium. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kualitas proses pembelajaran serta motivasi belajar peserta didik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola yang adaptif terhadap karakteristik geografis dan sosiokultural sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam di daerah 3T. Akses jalan ke desa-desa seperti Muara Parlampungan sangat terbatas, terutama saat musim hujan, yang menyebabkan isolasi fisik lembaga pendidikan. Beberapa madrasah dan sekolah masih berada dalam kondisi bangunan yang tidak layak, dengan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang minim.

Lemahnya infrastruktur pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) merupakan salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di desa Parlampungan. Kondisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sarana fisik seperti bangunan sekolah dan fasilitas pendukung, hingga akses terhadap teknologi informasi yang memadai. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Islam di daerah tersebut.

Banyak sekolah dan madrasah di daerah 3T menghadapi kondisi bangunan yang tidak layak, kekurangan ruang kelas, serta minimnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium. Hal ini diperparah oleh sulitnya akses menuju lokasi sekolah akibat kondisi geografis yang menantang, seperti daerah pegunungan, pulau terpencil, atau wilayah dengan infrastruktur transportasi yang buruk. Kondisi ini menghambat proses belajar mengajar dan menurunkan motivasi belajar siswa. Fardila et al., (2025).

Menurut Dalimunthe (2025), solusi untuk mengatasi krisis pendidikan di daerah 3T mencakup pembangunan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas guru, serta penguatan kurikulum melalui program-program seperti "Guru Mengabdi". Namun, implementasi solusi ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Keterbatasan infrastruktur tidak hanya mempengaruhi aspek fisik pendidikan, tetapi juga berdampak pada kualitas pembelajaran. Kekurangan fasilitas yang memadai menghambat penerapan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi informasi menghalangi integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, yang semakin penting di era digital saat ini. Maka dari itu, penulis membahas pada daerah desa Parlampungan, Kabupaten Mandailing Natal. Muara Parlampungan adalah desa yang berada di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini termasuk dalam wilayah administratif yang memiliki keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur dasar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Kabupaten Mandailing Natal termasuk dalam daftar daerah tertinggal. Sebagai bagian dari kabupaten tersebut, Desa Muara Parlampungan secara tidak langsung juga menghadapi tantangan yang serupa, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan sumber daya manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022).

Kondisi Desa Muara Parlampungan yang menghadapi tantangan dalam sektor pendidikan, infrastruktur, dan aksesibilitas menjadikannya relevan sebagai studi kasus untuk penelitian mengenai tantangan tata kelola pendidikan Islam di daerah 3T. Faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, dan benturan antara nilai-nilai lokal dengan pendekatan pendidikan nasional dapat dianalisis lebih lanjut dalam konteks ini.

Dalam konteks pendidikan agama Islam, keterbatasan ini juga menghambat penyampaian materi yang relevan dan kontekstual. Menurut Ibrahim & Islamiah (2024), menyoroti bahwa pendidikan agama Islam di daerah 3T mengalami berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas, dan minimnya bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Para ahli menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam mengatasi tantangan infrastruktur pendidikan di daerah 3T. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur fisik yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga pendidik,

serta integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendukung dan berkelanjutan dari pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.

Secara keseluruhan, mengatasi lemahnya infrastruktur pendidikan di daerah 3T memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hanya dengan demikian, pendidikan Islam di daerah 3T dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional.

B. Terbatasnya Jumlah Tenaga Pendidik

Kendala lain yang cukup menonjol adalah terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang berkualifikasi, baik dari segi akademik maupun pedagogik. Banyak guru yang mengajar di wilayah 3T tidak memiliki latar belakang pendidikan formal keguruan, dan sebagian besar merupakan relawan atau alumni lembaga itu sendiri. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi sumber daya manusia pendidikan, yang tidak hanya berimplikasi pada mutu pendidikan tetapi juga pada keberlangsungan lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Dalam konteks ini, teori-teori tata kelola pendidikan berbasis keadilan distributif dan prinsip desentralisasi menjadi sangat relevan. Tata kelola yang adil menuntut adanya alokasi sumber daya yang proporsional berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar kuantitas populasi atau faktor ekonomi makro. Banyak guru agama dan guru umum di daerah ini adalah tenaga honorer atau berstatus sukarela. Sulitnya akses dan insentif rendah menyebabkan tenaga pendidik enggan bertugas dalam jangka panjang di daerah ini.

Kekurangan tenaga pendidik di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) merupakan tantangan serius dalam tata kelola pendidikan Islam di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kuantitas guru, tetapi juga kualitas pengajaran, distribusi tenaga pendidik, dan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam di wilayah-wilayah tersebut. Data dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2020 menunjukkan bahwa daerah 3T masih kekurangan sekitar 21.676 guru, dengan rincian: SD kekurangan 6.879 guru, SMP 9.659 guru, SMA 2.850 guru, dan SMK 2.288 guru. Kekurangan ini menyebabkan rasio guru-murid yang sangat tinggi, seperti di Kabupaten Yahukimo, Papua, yang memiliki rasio guru SD 1:469 dan SMP 1:86, jauh di atas standar ideal 1:32 untuk SD dan 1:36 untuk SMP (Muslim et al., 2023).

Selain jumlah, kualitas guru di daerah 3T juga menjadi perhatian. Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya atau belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4. Misalnya, di Keerom, Papua, ditemukan guru SD lulusan SMA yang mengajar beberapa kelas sekaligus, bahkan mata pelajaran yang berbeda, karena kekurangan guru. Fenomena ini menunjukkan bahwa distribusi guru yang tidak merata dan kurangnya pelatihan berkelanjutan menjadi faktor utama rendahnya mutu pendidikan di wilayah 3T (Kusumaningsih et al., 2023). Faktor geografis dan infrastruktur juga mempengaruhi distribusi guru. Wilayah 3T seringkali sulit dijangkau, dengan akses transportasi yang terbatas dan infrastruktur pendidikan yang minim. Hal ini membuat banyak guru enggan ditempatkan di daerah tersebut (Dina, 2024).

Dalam konteks pendidikan Islam, kekurangan tenaga pendidik di daerah 3T berdampak pada keberlangsungan madrasah dan pesantren. Banyak lembaga pendidikan Islam di wilayah ini bergantung pada guru lokal atau alumni yang kembali mengajar tanpa memiliki kualifikasi formal. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga mutu pendidikan dan integrasi kurikulum nasional dengan nilai-nilai lokal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan distribusi dan kualitas guru, perbaikan infrastruktur, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru. Selain itu, pelatihan berbasis teknologi dan pengembangan kurikulum yang kontekstual dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan Islam di daerah 3T.

Dengan komitmen dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, diharapkan tantangan kekurangan tenaga pendidik di daerah 3T dapat diatasi, sehingga pendidikan Islam yang berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (Evan, 2023).

C. Rendahnya Kapasitas Manajerial Lembaga Pendidikan

Temuan lain yang signifikan adalah rendahnya kapasitas manajerial lembaga pendidikan dalam merumuskan perencanaan strategis jangka panjang. Banyak lembaga pendidikan Islam di daerah 3T tidak memiliki dokumen perencanaan yang sistematis, seperti Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), maupun sistem evaluasi internal yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan lemahnya internalisasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pendidikan, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Beberapa pengelola madrasah mengaku belum mendapatkan pelatihan manajerial dan administratif dari instansi pemerintah terkait. Ini membuka ruang diskusi

mengenai perlunya afirmasi kebijakan yang tidak hanya menyentuh aspek fisik dan material, tetapi juga kapasitas institusional.

Rendahnya kapasitas manajerial lembaga pendidikan Islam di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) merupakan tantangan serius yang menghambat peningkatan mutu pendidikan. Keterbatasan dalam perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas lembaga-lembaga pendidikan di wilayah ini. Kepala madrasah dan pimpinan lembaga Islam setempat minim pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta belum optimal dalam menyusun rencana strategis pendidikan. Tidak semua lembaga terdaftar atau diakui secara administratif oleh Kementerian Agama karena keterbatasan pemahaman administratif.

Dalam konteks ini, penelitian oleh Asiska dan Nurmahmudah, mengungkapkan bahwa pengelolaan pendidikan di daerah 3T dapat terarah dan berkualitas jika kebutuhan pendidik terpenuhi, baik dari permasalahan individu guru maupun lingkungan sekolah. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana serta faktor geografis menjadi hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan tersebut (Asiska & Nurmahmudah, 2022). Lebih lanjut, Rahadian dalam studinya mengenai kebijakan manajemen guru di Kabupaten Bangka Selatan menyoroti bahwa manajemen guru masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan. Kapasitas profesional guru masih jauh dari harapan, dan pengelolaan guru oleh pemerintah daerah belum optimal (Rahadian, 2023). Dalam era digital, adaptasi terhadap teknologi juga penting. Haris dalam artikelnya menekankan perlunya transformasi digital dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, termasuk pengembangan sistem pelayanan berbasis digital dan model pembelajaran kekinian seperti *e-learning* (Haris, 2019).

Sebagai langkah konkret, pelatihan kepala madrasah di daerah 3T yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bertujuan untuk memperkuat kemampuan manajerial dan kepemimpinan kepala madrasah dalam mengatasi berbagai tantangan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Dengan demikian, peningkatan kapasitas manajerial lembaga pendidikan Islam di daerah 3T memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan manajemen, pengembangan profesionalisme guru, adaptasi teknologi, dan dukungan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan lokal.

D. Benturan Nilai Lokal dengan Pendekatan Pendidikan Nasional

Dari sisi budaya, ditemukan pula adanya benturan antara nilai-nilai lokal dengan pendekatan pendidikan nasional. Masyarakat di Batang Natal masih menjunjung tinggi adat dan praktik Islam lokal, seperti sistem halaqah tradisional dan pendidikan berbasis surau, yang kadang berbenturan dengan kurikulum nasional berbasis SK-KD. Ketegangan juga terjadi dalam penerimaan pendidikan formal bagi anak perempuan di beberapa komunitas tradisional, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal tertentu. Kurikulum nasional kadang dianggap terlalu normatif dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, terutama dalam konteks masyarakat adat atau komunitas terpencil dengan bahasa ibu dan tradisi yang kuat. Beberapa pesantren lokal berhasil mereduksi konflik ini dengan menyusun kurikulum muatan lokal yang memasukkan nilai-nilai kearifan tradisional dalam bingkai keislaman, seperti penggunaan bahasa daerah dalam pengajaran agama atau pendekatan musyawarah dalam pembinaan karakter. Hal ini memperkuat argumen para ahli seperti Paulo Freire, yang menekankan pentingnya pendidikan kontekstual dan emansipatoris sebagai jalan keluar dari pendidikan yang teralienasi.

Benturan antara nilai-nilai lokal dengan pendekatan pendidikan nasional di Indonesia, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, pendidikan nasional dirancang untuk menyatukan keragaman budaya dalam satu kerangka kebangsaan. Namun, pendekatan yang terlalu seragam sering kali tidak mengakomodasi kekayaan budaya lokal yang ada di berbagai daerah.

Penelitian oleh Sutarno di Madrasah Diniyah Takmiliah Pelem Jati, Kabupaten Blora, menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal dapat memperkuat identitas budaya siswa. Kurikulum tersebut memasukkan muatan lokal seperti Arab Pegon, Fasholatan, Barzanji Diba', Yasin Tahlil, dan Bahasa Jawa, serta kegiatan ekstrakurikuler seperti seni hadrah dan kaligrafi. Langkah ini tidak hanya melestarikan tradisi lokal tetapi juga meningkatkan relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sutarno, (2021).

Namun, integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum nasional menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan budaya antara daerah dan kota, serta keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru dalam memahami dan mengajarkan budaya lokal. Selain itu, persepsi bahwa kearifan lokal kurang penting dibandingkan materi akademik juga menjadi hambatan Nabilah, (2024).

Dalam konteks ini, pendekatan pendidikan yang menghargai kearifan lokal menjadi sangat penting. Ki Hadjar Dewantara telah menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya masyarakat dan menjadi proses pembudayaan sepanjang hayat. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal tidak hanya memperkuat identitas budaya siswa tetapi juga membentuk karakter yang sesuai dengan lingkungan sosial mereka (Nisa & Rivo Nugroho, 2017).

Untuk mengatasi benturan antara nilai lokal dan pendekatan pendidikan nasional, diperlukan strategi yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks lokal, seperti yang diusulkan dalam Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan dan budaya lokal siswa (Ni Luh Purnamasuari Prapnuwanti et al., 2024).

Selain itu, pelatihan guru yang berfokus pada pemahaman dan pengajaran kearifan lokal juga penting. Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah telah menyelenggarakan pelatihan yang mengintegrasikan teknologi dan kearifan lokal dalam pembelajaran, khususnya di daerah 3T. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang relevan dengan konteks lokal (Wulandari, 2024).

Secara keseluruhan, harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan pendekatan pendidikan nasional memerlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan mengakui dan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan, Indonesia dapat membangun pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan.

Implikasi dari temuan-temuan di atas sangat luas. Dalam konteks kebijakan, pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan kerangka kerja tata kelola pendidikan Islam yang adaptif terhadap realitas lokal, termasuk memperkuat sinergi antara kementerian, organisasi keagamaan, dan masyarakat adat. Pendekatan *bottom-up* menjadi penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil lapangan. Pemerintah juga perlu merancang mekanisme insentif untuk guru dan tenaga pendidik yang bersedia mengabdikan diri di daerah 3T, serta memperluas akses terhadap pelatihan dan sertifikasi berbasis daring dengan infrastruktur penunjang yang memadai.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya redefinisi terhadap konsep tata kelola pendidikan Islam dalam konteks marginalitas. Model-model tata kelola yang dibangun berdasarkan asumsi wilayah urban dan aksesibilitas tinggi perlu dikaji ulang dan

diadaptasi ke dalam kerangka kerja yang lebih fleksibel, partisipatif, dan inklusif. Pendekatan transformatif berbasis komunitas, seperti yang ditawarkan oleh teori *critical pedagogy* dan *community-based governance*, dapat menjadi alternatif strategi yang memperkuat daya tahan lembaga pendidikan Islam dalam situasi keterbatasan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya studi komparatif antara tata kelola pendidikan Islam di daerah 3T dengan wilayah non-3T, guna mendapatkan pemetaan tantangan dan strategi yang lebih menyeluruh. Penelitian lebih lanjut juga dapat mendalami peran perempuan dalam tata kelola pendidikan Islam di wilayah 3T, mengingat peran ganda mereka sebagai pendidik informal dalam keluarga maupun komunitas. Di samping itu, penting juga dilakukan penelitian kebijakan yang mengkaji sejauh mana efektivitas program afirmasi pendidikan Islam oleh negara, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam di wilayah 3T.

Dengan demikian, bagian ini menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan Islam di daerah 3T membutuhkan perhatian khusus yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pembangunan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan rekognisi terhadap kearifan lokal. Pendekatan holistik dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan yang kompleks ini. Peran akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan sangat krusial untuk mendorong lahirnya inovasi tata kelola yang berpihak pada masyarakat pinggiran namun memiliki potensi spiritual dan sosial yang luar biasa.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tata kelola pendidikan Islam di daerah 3T menghadapi tantangan yang serius dan kompleks, mencakup keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, lemahnya kapasitas manajerial lembaga pendidikan, serta adanya benturan antara pendekatan pendidikan nasional dengan nilai-nilai lokal. Tantangan-tantangan ini saling berkelindan dan berdampak langsung terhadap kualitas, keberlanjutan, serta relevansi pendidikan Islam di wilayah terpinggirkan.

Ditemukan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam di daerah 3T bertahan melalui inisiatif komunitas dan partisipasi lokal, namun mereka kerap terkendala dalam aspek administratif, akses teknologi, dan dukungan kebijakan. Ketimpangan dalam distribusi guru yang berkualifikasi, minimnya pelatihan manajerial, serta belum optimalnya pemanfaatan kurikulum yang kontekstual memperlihatkan bahwa pendekatan tata kelola yang diterapkan selama ini belum sepenuhnya adaptif terhadap realitas geografis dan budaya masyarakat 3T.

Salah satu poin krusial yang muncul adalah benturan antara nilai-nilai lokal dengan pendekatan pendidikan nasional yang terlalu seragam. Ketidaksesuaian antara kurikulum formal dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di daerah 3T berpotensi mengasingkan mereka dari identitas budaya dan sosialnya. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal ke dalam tata kelola pendidikan Islam menjadi langkah strategis untuk menjembatani ketimpangan tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan pendidikan yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan berbasis komunitas.

Dari temuan dan diskusi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pendidikan Islam di daerah 3T membutuhkan reformasi struktural dan kultural. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan yang afirmatif, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kurikulum berbasis lokalitas, serta kolaborasi multisektor yang inklusif. Model tata kelola yang ideal bukan hanya bersandar pada prinsip *good governance*, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas sosial dan geografis wilayah 3T.

Untuk mendukung keberlanjutan pendidikan Islam di daerah 3T, diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada strategi penguatan kapasitas kelembagaan, peran aktor lokal (termasuk tokoh agama dan adat), serta evaluasi longitudinal terhadap efektivitas intervensi kebijakan yang telah diterapkan. Dengan demikian, pendidikan Islam di daerah 3T tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh sebagai agen transformasi sosial dan kultural di tengah keterbatasan.

REFERENSI

- Asiska, I., & Nurmahmudah, F. (2022). Pengelolaan Tenaga Pendidikan di Daerah 3T SMP Negeri 1 Maratua. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 7124–7131.
- Dalimunthe, S. M. (2025). *Solusi Krisis Pendidikan Di Daerah 3T: Pendekatan dan Inovasi Untuk Kemajuan*. 08(April), 1–20.
- Dina, Z. A. R. (2024). *Guru dan Fenomena Distribusi Guru dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia*. Suara Muda. <https://suaramuda.net/2024/12/guru-dan-fenomena-distribusi-guru-dalam-pemerataan-pendidikan-di-indonesia/>
- Evan, M. (2023). *Kekurangan Guru di Wilayah 3T, Puji Sutyowati Dorong Pelatihan Guru*. Jurnal Kaltim. <https://jurnalkaltim.com/kalimantan-timur/kekurangan-guru-di-wilayah-3t/>
- Fardila, A., Khalifah, H., Restarie, M. D., Rosyidi, U., & Takdir, M. (2025). *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Keuangan untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di Daerah 3T: Systematic Literature Review*. 07(02), 9040–9048.

- Haris, M. (2019). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 58–78. https://www.academia.edu/44682444/Manajemen_Lembaga_Pendidikan_Islam_Dalam_Menghadapi_Revolusi_Industri_4_0?
- Ibrahim, M. N., & Islamiah, R. (2024). *Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan)*. 6(2), 1142–1151.
- Kusumaningsih, D. I., Muslim, F., & Kusumaningrum, D. D. (2023). *Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah Tertinggal*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t-819928?>
- Lembaran Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 63, 6 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/227389/peraturan-ojk-no-14pojk042022-tahun-2022>
- Muslim, F., Kusumaningsih, D. I., & Kusumaningrum, D. D. (2023). *Ternyata, Pembelajaran Daring di Daerah Terpencil Semasa Pandemi Tidak Efektif: Ini Akar Permasalahannya*. The Conversation. <https://theconversation.com/ternyata-pembelajaran-daring-di-daerah-terpencil-semasa-pandemi-tidak-efektif-ini-akar-masalahnya-213264?>
- Ni Luh Purnamasuari Prapnuwanti, Komang Dewi Susanti, I Wayan Wira Darma, Ketut Bali Sastrawan, & Putu Wulandari Tristananda. (2024). Kurikulum Merdeka Belajar Terintegrasi Budaya Lokal. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 33–40. <https://doi.org/10.23887/jppp.v8i1.68661>
- Nisa, A. F., & Rivo Nugroho. (2017). Implementasi Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal di SD Negeri Jarakan Panggunharjo Sewon Bantul. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 5(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/21149?>
- R, I. N. (2024). *Kearifan Lokal: Kunci Sukses Pendidikan Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/123241018/66c73ddc34777c76a1072c12/kearifan-lokal-kunci-sukses-pendidikan-indonesia?>
- Rahadian, R. B. (2023). Analysis of Teacher's Management Policy: A Case Study of South Bangka, Indonesia. *Papernia - Multidisciplinary Scientific Journal for Innovative Research*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.59178/papernia.202301015>
- Sutarno. (2021). Eksplorasi Kearifan Lokal dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Madrasah Diniyah Takmiliah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(2), 412–423. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(2\).8132](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(2).8132)

Wulandari, Y. (2024). *Kolaborasi Teknologi dan Kearifan Lokal: Transformasi Pendidikan di Madrasah*. Pendis Kemenag. <https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-guru-dan-tenaga-kependidikan/kolaborasi-teknologi-dan-kearifan-lokal-transformasi-pendidikan-di-madrasah?>